



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Binjai kepada DPRD Kota Binjai merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat yang mengamanatkan bahwa LKPJ ini harus sudah disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah mendorong semua pihak untuk membangun pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah dalam koridor hubungan checks and balances. Dalam konteks ini, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD sama-sama memiliki hak konstitusional untuk memprakarsai penetapan kebijakan, terutama di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pengaturan pola-pola penggunaan anggaran daerah. Walaupun demikian, karena Pemerintahan Daerah menganut prinsip kesetaraan yang sejajar, maka setiap prakarsa yang timbul harus dibahas dan disepakati bersama dan dituangkan ke dalam koridor Peraturan Daerah maupun Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budaya politik demokratis adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan segenap masyarakat Kota Binjai. Dalam kerangka prinsip dasar dan norma juridis seperti itulah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Binjai ini disusun dan disampaikan, dengan harapan dapat melahirkan satu pemahaman yang sama tentang kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Walikota Binjai selama periode 2016. Sesuai dengan norma juridis yang berlaku, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Binjai ini adalah merupakan progress report, yang memuat penjelasan dan informasi faktual tentang perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.



1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Binjai akhir tahun anggaran 2016 adalah tersusunnya media penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban Kepala Daerah selama tahun 2016. Sementara itu, tujuannya adalah:

1. Menyediakan alat kendali bagi DPRD Kota Binjai dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkesinambungan, bertanggungjawab dan bertanggungjawab;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi Regional dan Nasional serta memahami arah dan tujuan yang ingin dan telah dicapai dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Binjai, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sekaligus melakukan reviewing (kaji ulang) atas hasil yang telah dicapainya guna perbaikan dan keberlanjutan pembangunan ke depan.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Binjai ini mengacu pada sejumlah peraturan perundangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
18. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 140-1395/SK/1993 tentang Pembentukan 6 (enam) Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan di Kota Binjai;
19. SK Gubernur Sumatera Utara 146/2624/SK/1996 tanggal 17 Agustus 1996, 17 (tujuh belas) Desa Menjadi Kelurahan.

1.4 GAMBARAN UMUM DAERAH

1.4.1 Profil Geografi

Secara umum Kota Binjai terletak pada 3°31'40" - 3°40'2" LU dan 98°27'3" - 98°32'32" BT. Adapun mengenai batas-batas wilayah administrasi Kota Binjai dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Binjai (Kabupaten Langkat) dan Kecamatan Hampan Perak (Kabupaten Deli Serdang).
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingai (Kabupaten Langkat) dan Kecamatan Kutalimbaru (Kabupaten Deli Serdang).
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal (Kabupaten Deli Serdang).
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai (Kabupaten Langkat).

Saat ini Kota Binjai, secara administratif memiliki 5 Kecamatan dan 37 kelurahan. Kecamatan Binjai Selatan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu 29,96 Km², sedangkan wilayah kecamatan yang paling kecil luasnya yaitu Kecamatan Binjai Kota (4,12 Km²). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel I.1**

Tabel I.1

Nama dan Luas Wilayah Per-Kecamatan serta Nama Kelurahan di Kota Binjai

Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%) Terhadap Total Administrasi
Binjai Selatan	Tanah Merah	650	22
	Bhakti Karya	919	31
	Tanah Seribu	498	17
	Pujidadi	355	12
	Binjai Estate	361	12
	Rambung Barat	80	3



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

	Rambung Dalam	93	3
	Rambung Timur	40	1
Jumlah		2996	100
Binjai Kota	Bergam	179	43
	Satria	40	10
	Setia	35	8
	Kartini	36	9
	Tangsi	42	10
	Binjai	40	10
	Pekan Binjai	41	10
Jumlah		413	100
Binjai Timur	Mencirim	142	7
	Tunggurono	1066	49
	Dataran Tinggi	81	4
	Timbang Langkat	231	11
	Tanah Tinggi	80	4
	Sumber Mulyorejo	258	12
	Sumber Karya	312	14
Jumlah		2170	100
Binjai Utara	Pahlawan	117	5
	Jatinegara	31	1
	Nangka	121	5
	Jati Makmur	332	14
	Damai	75	3
	Kebun Lada	135	6
	Cengkeh Turi	1008	43
	Jati Karya	221	9
	Jati Utomo	319	14
Jumlah		2359	100
Binjai Barat	Bandar Sinembah	221	20
	Limau Mungkur	117	11
	Limau Sundai	111	10
	Paya Roba	400	37
	Suka Maju	143	13
	Suka Ramai	94	9
Jumlah		1086	100
TOTAL		9024	

Sumber : Binjai Dalam Angka 2016, BPS

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan



pada tiap bulan terjadinya musim. Kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Binjai Selatan sebesar 342,91 mm/15 hari hujan dan Kecamatan Binjai Kota sebesar 228,41 mm/10 hari hujan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel I.2**.

Tabel I.2

Jumlah Curah Hujan di Kota Binjai

No	Kecamatan	Curah Hujan Rata-rata (mm ³)	Hari Hujan Rata-rata
1	Binjai Selatan	342,91	15,91
2	Binjai Kota	228,41	10
3	Binjai Timur	159,16	9,08
4	Binjai Utara	175,08	11,66
5	Binjai Barat	220,75	10,5

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka 2016, BPS

Karakteristik fisik dasar Kota Binjai pada umumnya berada pada topografi yang datar yang memanjang dari bagian utara Kota Binjai sampai bagian wilayah selatan Kota Binjai dengan bentang alam yang tidak berbukit, hanya sebagian daerah saja yang memiliki bentang alam berbukit yaitu di wilayah Kota Binjai bagian selatan. Kondisi tersebut diketahui dengan tingkat kemiringan lereng yang landai/datar dan berada di ketinggian berkisar antara 3 sampai 76.5m dpl.

Kota Binjai memiliki dua daerah aliran sungai (DAS). Dimana sebagian besar wilayah bagian barat termasuk kedalam DAS Wampu dan sebagian kecil wilayah daerah Timur termasuk ke dalam DAS Belawan. Kota Binjai dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai Marcapada, Sungai Mencirim dan Sungai Bangkatan. Data Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati kota Binjai dapat dilihat pada **Tabel I.3**

Tabel I.3

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Binjai

No	Sungai	Panjang (Km)	Luas (Km ³)	Kawasan	Debit Maks (diambil pada saat musim hujan)	DAS
1	S. Bingai	15	150	Binjai Utara	0.7 m ³ /det	Wampu
2	S. Mencirim	15	150	Binjai Utara	0.3 -0.5 m ³ /det	Wampu
3	S. Bangkatan	9	45	Binjai Selatan	0.1 - 0.3 m ³ /det	Wampu
4	Anak Sungai			Binjai Timur		Belawan

Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2011-2030

1.4.2 Profil Demografi

Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2016 sekitar 267.901 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 61.518 rumah tangga. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Binjai Utara dengan jumlah penduduk sekitar 77.011 jiwa (17.732 rumah tangga), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang terkecil adalah kecamatan



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

Binjai Kota dengan jumlah penduduk sekitar 28.893 jiwa (7.629 rumah tangga). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel I.4**

Tabel I.4

Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga di Kota Binjai tahun 2016

No	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rumah Tangga
1	Binjai Selatan	2.996	54.422	11.998
1.1	Tanah Merah	650	6.666	1.511
1.2	Bhakti Karya	919	5.429	1.360
1.3	Tanah Seribu	498	6.841	1.694
1.4	Pujidadi	355	7.253	1.521
1.5	Binjai Estate	361	15.430	3.101
1.6	Rambung Barat	80	3.110	866
1.7	Rambung Dalam	93	6.844	1.230
1.8	Rambung Timur	40	2.849	715
2	Binjai Kota	412	28.893	7.629
2.1	Berngam	179	9.321	2.354
2.2	Satria	39	2.841	804
2.3	Setia	35	3.626	966
2.4	Kartini	36	2.398	726
2.5	Tangsi	42	2.421	693
2.6	Binjai	40	1.381	714
2.7	Pekan Binjai	41	6.905	1.372
3	Binjai Timur	2.170	59.174	13.547
3.1	Mencirim	142	8.531	2.091
3.2	Tunggorono	1.066	11.384	2.244
3.3	Dataran Tinggi	81	5.538	1.309
3.4	Timbang Langkat	231	3.634	1.232
3.5	Tanah Tinggi	80	4.295	1.405
3.6	Sumber Mulyorejo	258	11.573	2.686
3.7	Sumber Karya	312	14.219	2.580
4	Binjai Utara	2.359	77.011	17.732
4.1	Pahlawan	117	10.849	2.650
4.2	Jatinegara	31	3.023	854
4.3	Nangka	121	9.753	2.212
4.4	Jati Makmur	332	8.284	2.079
4.5	Damai	75	6.698	1.509
4.6	Kebun Lada	135	4.796	1.154
4.7	Cengkeh Turi	1.008	12.819	2.678
4.8	Jati Karya	221	9.459	2.171
4.9	Jati Utomo	319	11.330	2.425
5	Binjai Barat	1.086	48.401	10.612
5.1	Bandar Sinembah	221	5.624	1.344



5.2	Limau Mungkur	117	7.435	1.328
5.3	Limau Sundai	111	7.211	1.625

5.4	Paya Roba	400	11.050	2.210
5.5	Suka Maju	143	7.934	1.972
5.6	Suka Damai	94	9.147	2.133
	TOTAL	9.023	267.901	61.518

Sumber : Kecamatan Kota Binjai Dalam Angka 2016

1.4.3 Profil Pendidikan

A. Sarana Pendidikan

Kota Binjai merupakan kota yang memiliki infrastruktur yang cukup baik dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek pendidikan maupun kesehatan. Dilihat dari ketersediaan sarana pendidikan berupa banyaknya sekolah, Kota Binjai memiliki sebanyak 158 Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 126 SD Negeri dan 32 SD Swasta, 47 Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang terdiri dari 14 SMP Negeri dan 33 SMP Swasta, 27 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdiri dari 7 SMA Negeri dan 20 SMA Swasta, 23 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang terdiri dari 2 SMK Negeri dan 21 SMK Swasta.

Tabel I.5
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid (Orang)
SD	158	2 137	32 317
SMP	47	1 431	15 284
SMA	27	908	9 622

Sumber : Binjai Dalam Angka Tahun 2016, BPS

B. Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Indikator ini memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama penduduk muda. Oleh karena itu, tingkat partisipasi sekolah atau Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk menilai kesuksesan program wajib belajar. Tingkat partisipasi sekolah juga merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Pada umumnya pada tingkat pendidikan dasar tingkat partisipasi sekolah masih cukup tinggi, namun angka ini akan semakin turun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.



Tabel I.6

Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

Indikator	Satuan	Kota Binjai	Prov. Sumatera Utara
		2016	2016
7 – 12 Tahun	Persen	100	99,42
13 – 15 Tahun	Persen	96,61	96,48
16 – 18 Tahun	Persen	75,75	76,43
19 –24 Tahun	Persen	32,3	26,62

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016, BPS

Pada tabel diatas menunjukkan tingkat partisipasi sekolah di Kota Binjai pada tahun 2016 masih berada diatas tingkat partisipasi Provinsi Sumatera Utara, dimana tingkat partisipasi sekolah Kota Binjai menurut usia 7-12 tahun sebesar 100 %. Hal ini membuktikan bahwa program wajib belajar di Kota Binjai mengalami kesuksesan.

Tabel I.7

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan Tahun 2016

Status Pendidikan	Satuan	Kota Binjai	Prov. Sumatera Utara
		2016	2016
Tidak/Belum Pernah Sekolah	Persen	0,07	0,31
Masih Sekolah	Persen	23,51	24,85
SD	Persen	6,59	8,34
SMTP	Persen	5,34	7,16
SMTA	Persen	7,4	6,35
Diploma/Sarjana	Persen	4,17	3,01
Tidak Bersekolah lagi	Persen	76,42	74,84

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016, BPS

Pada tabel di atas menunjukkan persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat partisipasi sekolah Kota Binjai tahun 2016 masih berada lebih baik dari partisipasi sekolah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat dari angka tingkat partisipasi sekolah Kota Binjai dengan status pendidikan tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,07 % sedang untuk tingkat partisipasi sekolah provinsi Sumatera Utara sebesar 0,31 %.Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas pada tingkat pendidikan SMTA Kota Binjai tahun 2016 sebesar 7,4 % sedangkan tingkat provinsi Sumatera Utara sebesar 6,35 %.



C. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dengan meningkatnya jenjang pendidikan penduduk suatu daerah dapat dikatakan kualitas daerah tersebut semakin meningkat. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari derajat tingkat pendidikan yang dicapai masyarakat.

Tabel I.8

Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk 10 Tahun Keatas Tahun 2016

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Satuan	Kota Binjai	Prov. Sumatera Utara
		2016	2016
Tidak/Belum Pernah Sekolah	Persen	0,07	0,31
Tidak/Belum Tamat SD	Persen	10,73	17,13
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
SD	Persen	27,64	26,6
SMTP	Persen	12,93	17,16
SMTA	Persen	31,76	27,12
Kejuruan	Persen	5,51	4,93
Diploma I/II	Persen	0,36	0,35
Diploma III	Persen	2,47	1,45
Diploma IV/Sarjana	Persen	8,52	4,95

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016, BPS

Pada Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kota Binjai pada tingkat pendidikan SD, SMTA dan Tingkat Sarjana sebesar 27,64%, 31,76% dan 8,52% pada tahun 2016, jika dibandingkan dengan angka persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 26,6 %, 27,12% dan 4,95%.

D. Angka Buta Huruf

Keberhasilan program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dinilai dari tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Tingkat buta huruf dapat juga dijadikan sebagai indikator dasar pemerataan pendidikan masyarakat. Kemampuan membaca dan menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam proses pembangunan.

Tabel I.9

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Buta Huruf Tahun 2015-2016

Daerah	Satuan	Tahun
--------	--------	-------



		2015	2016
Binjai	Persen	0,38	0,23
Sumatera Utara	Persen	1,18	1,08

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai, BPS

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat persentase angka buta huruf di Kota Binjai dari tahun 2015-2016 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pemerataan pendidikan di masyarakat telah berjalan untuk mendukung program pendidikan nasional.

1.4.4 Profil Kesehatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut. Kualitas penduduk secara fisik khususnya, dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara menyeluruh. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil. Untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat suatu daerah, banyak sekali indikator yang dapat digunakan. Indikator-indikator yang dapat digunakan tersebut diantaranya adalah tingkat kesakitan (Morbidity Rate), tenaga penolong kelahiran, tingkat kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR) dan angka harapan hidup.

A. Angka Kesakitan (Morbidity Rate)

Salah satu indikator derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate). Semakin banyak penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, menunjukkan bahwa derajat kesehatan di suatu daerah masih rendah, demikian juga sebaliknya, apabila angka kesakitan penduduk rendah, menunjukkan derajat kesehatan di daerah tersebut sudah semakin baik. Angka kesakitan ini dapat dicerminkan oleh banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan berdasarkan jenis keluhan yang dideritanya.

Tabel I.10

Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin

Daerah	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kota Binjai	12,10	10,40	11,25	13,15	12,60	12,87

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai, BPS

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih beresiko untuk menderita sakit dibanding penduduk perempuan walaupun tidak signifikan secara deskriptif.



B. Penolong Kelahiran

Selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu selama mengandung dan masa menyusui, kesehatan balita dapat dipengaruhi oleh penanganan yang dilakukan ketika ibu melahirkan bayi tersebut. Persalinan yang ditolong oleh tenaga dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik daripada yang ditolong oleh dukun, atau lainnya. Penanganan yang kurang baik oleh penolong kelahiran dapat mengakibatkan kondisi kesehatan bayi dan ibumenjadi berbahaya seperti : kejang-kejang, pendarahan maupun kematian ibu dan anak yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun dan ini dapat diindikasikan masih rendahnya tingkat kesehatan di daerah tersebut.

Tabel I.11

Persentase Balita Menurun Penolong Kelahiran Di Kota Binjai Tahun 2016

Tenaga Medis	Satuan	Kota Binjai	Prov. Sumatera Utara
		2016	2016
Dokter Kandungan	Persen	36,94	23,90
Dokter Umum	Persen	3,59	2,41
Bidan	Persen	59,47	68,71
Tenaga Medis Lainnya	Persen	0	0,72
Dukun	Persen	0	3,43
Lainnya	Persen	0	0,82

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016, BPS

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penolong kelahiran bayi terakhir di Kota Binjai masih didominasi oleh bidan yaitu sebesar 59,47 persen. Di urutan kedua dengan tahun yang sama, penolong kelahiran bayi terakhir oleh tenaga dokter sekitar 36,94 persen. Angka ini sudah dapat menggambarkan bahwa di Kota Binjai masyarakatnya sudah sadar akan pentingnya kesehatan.

C. Pemberian Imunisasi

Imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit serius yang paling efektif untuk bayi dari segi biaya (Wahab, 2000). Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal pada bayi yang baru lahir sampai usia satu tahun untuk mencapai kadar kekebalan diatas ambang perlindungan (Depkes RI, 2005). Pemerintah Indonesia sangat mendorong pelaksanaan program imunisasi sebagai cara untuk menurunkan angka kesakitan, kematian pada bayi, balita/ anak - anak pra sekolah. Adapun tujuan program imunisasi dimaksud bertujuan sebagai berikut. Adapun tujuan program imunisasi dimaksud bertujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum, yakni untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi akibat Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Penyakit dimaksud antara lain Difteri, Tetanus, Pertusis (batuk rejam), Measles (campak), Polio dan Tuberculosis.
2. Tujuan Khusus, antara lain :



- a. Tercapainya target Universal Child Immunization (UCI), yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di 100% desa Kelurahan pada tahun 2010.
- b. Tercapainya ERAPO (Eradikasi Polio), yaitu tidak adanya virus polio liar di Indonesia yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya virus polio liar pada tahun 2008.
- c. Tercapainya ETN (Eliminasi Tetanus Neonatorum), artinya menurunkan kasus TN sampai tingkat 1 per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun pada tahun 2008.
- d. Tercapainya RECAM (Reduksi Campak), artinya angka kesakitan campak turun pada tahun 2006.

Tabel I.12

Persentase Anak Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Menurut Jenis Imunisasi Dan Jenis Kelamin Kota Binjai Tahun 2016

Jenis Imunisasi	Satuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
BCG	Persen	83,93	92,21	88,2
DPT	Persen	90,56	90,65	90,61
Polio	Persen	76,72	79,37	78,09
Campak	Persen	77,23	74,47	75,81
Hepatitis B	Persen	66,00	63,32	64,62
Total	Persen	90,56	92,21	91,41

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2016, BPS

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase balita yang pernah diimunisasi pada tahun 2016 di Kota Binjai adalah sebesar 91,41 persen dengan komposisi balita laki-laki sebesar 90,56 persen dan 92,21 persen untuk balita perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para ibu sudah baik dalam hal pemeriksaan antenatal pasca bersalin. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa pemahaman para orang tua khususnya ibu akan pentingnya imunisasi sudah tergolong tinggi bila dilihat angka ketercapaian balita yang pernah diimunisasi.

D. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata- rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu.

Tabel I. 13

Angka harapan Hidup Kota Binjai tahun 2010-2015

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)
2010	71,2



2011	71,25
2012	71,29
2013	71,34
2014	71,39
2015	71,59

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai, BPS

Berdasarkan tabel diatas, terlihat perkembangan angka harapan hidup penduduk di Kota Binjai. Walaupun hanya mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, namun dapat dikatakan bahwa angka harapan hidup di Kota Binjai tergolong cukup baik. Berdasarkan tren tersebut, terlihat bahwa rata-rata lamanya hidup penduduk di Kota Binjai pada tahun 2015 adalah sebesar 71,59 tahun atau sekitar 71 - 72 tahun. Peningkatan angka harapan hidup selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat kenaikan taraf hidup masyarakat di Kota Binjai walaupun angka harapan hidup bukan satu - satunya indikator penentu tingkat kesejahteraan masyarakat.

E. Tenaga Dan Sarana Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan serta didukung oleh sarana kesehatan yang memadai menjadi syarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Suatu hal yang mustahil jika cita-cita untuk meningkatkan kesehatan tanpa didukung oleh tenaga dan sarana yang cukup. Sarana kesehatan yang memadai merupakan syarat yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kecukupan tenaga kesehatan adalah rasio tenaga kesehatan (meliputi dokter dan paramedik perawatan) terhadap jumlah penduduk.

Pembangunan infrastruktur kesehatan di Kota Binjai pada tahun 2016 sudah tergolong baik dimana menurut data Dinas Kesehatan Kota Binjai 2016, terdapat 10 rumah Sakit di Kota Binjai yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 8 Rumah Sakit Swasta. 7 Rumah sakit berada di Binjai Kota dan Binjai Utara, 2 rumah sakit di Binjai Selatan, dan 1 rumah sakit di Binjai Timur.

Fasilitas kesehatan pada level kecamatan di Kota Binjai terbilang memadai jumlahnya, namun tetap harus dikontrol pemanfaatannya seiring dengan pembangunan infrastruktur yang lain. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 8 unit puskesmas, 18 unit puskesmas pembantu, 85 unit praktek dokter dan 39 praktek bidan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel I.14

Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Kota Binjai

Tenaga Kesehatan	Jumlah	Tenaga Kesehatan Per 10.000 Penduduk
-------------------------	---------------	---------------------------------------------



Dokter	388	7
Paramedis	388	25

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai, BPS

Selanjutnya jika dilihat rasio pelayanan kesehatan menurut jenis tenaga kesehatan terlihat bahwa setiap 10.000 penduduk Kota Binjai dilayani oleh sekitar 7 dokter dan 25 orang paramedis perawatan. Jumlah tenaga bidan dan paramedis lainnya lebih banyak dibanding dokter. Kecukupan tenaga kesehatan ini juga masih jauh dari yang diharapkan, karena setiap 10.000 penduduk di Kota Binjai hanya dilayani sekitar 7 orang tenaga medis dan 25 orang paramedis perawatan. Untuk itu, sudah seharusnya kuantitas tenaga kesehatan di Kota Binjai ditingkatkan demi tercapainya pelayanan yang optimal dengan catatan tidak hanya menambah jumlah armada tenaga kesehatan, tetapi juga pemerataan keberadaan tenaga kesehatan tersebut sampai level terkecil.

1.4.5 Profil Ekonomi

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

1.4.5.1 Potensi Unggulan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, produk unggulan adalah produk berupa barang maupun jasa yang dihasilkan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki daerah seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Melalui produk unggulan daerah dapat tergambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya serta memiliki daya saing yang tinggi. Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kota Binjai yang telah berkembang maupun potensial untuk dikembangkan, antara lain:

1. Sektor Industri

Untuk sektor industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kota Binjai adalah jenis usaha industri rumah tangga. Industri rumah tangga yang terdapat di Kota Binjai seperti



mebel, makanan ringan, konveksi, bordir, tenun, kerajinan bambu, bengkel, tusuk sate, songkok ayam, sepatu/sandal, tempe/tahu dan sunun ayam. Usaha industri rumah tangga tersebar di Kota Binjai dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 148 orang dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 480 orang pada tahun 2016. Sedangkan jumlah industri besar/ sedang di Kota Binjai sebanyak 11 unit industri dan 192 unit industri kecil.

2. Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan

Potensi pertanian Kota Binjai diantaranya buah-buahan dan tanaman bahan makanan. Produksi hasil pertanian di Kota Binjai telah dipasarkan secara lokal maupun keluar kota. Produksi buah-buahan yang menjadi produk unggulan daerah Kota Binjai adalah produksi jambu madu hijau dan rambutan. Hampir semua kecamatan telah membudidayakan tanaman pohon jambu madu hijau dan rambutan, seperti di Kecamatan Binjai Selatan yang memiliki luas lahan budidaya jambu madu hijau dan rambutan sebesar 136,1 Ha. Sedangkan Kecamatan Binjai Timur memiliki luas lahan terkecil untuk budidaya jambu madu hijau dan rambutan sebesar 54,83 Ha. Kapasitas produksi jambu madu hijau dan rambutan di Kota Binjai dalam 1 (satu) tahun sebesar 893,13 ton/tahun.

Produksi perikanan di Kota Binjai didominasi oleh produksi ikan air tawar seperti ikan mas, ikan lele, ikan gurame dan ikan nila dengan jumlah produksi paling banyak didominasi oleh ikan lele sebanyak 2.807,96 ton dan luasan panen sebesar 7,92 Ha pada tahun 2015. Populasi ternak besar di Kota Binjai sebanyak 23.038 ekor terdiri dari sapi/lembu, kerbau, kambing/domba dan babi. Sedangkan populasi ternak unggas sebanyak 1.456.030 ekor terdiri dari ayam ras, ayam kampung, itik dan burung puyuh.

1.4.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah khususnya bidang ekonomi. Kinerja perekonomian Kota Binjai pada tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2014, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010, melambat dari 5,83 persen tahun 2014 menjadi 5,40 persen tahun 2015. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 12,26 % yang diikuti dengan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang sebesar 11,18 %.

Tabel I.18

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Binjai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%)

No	Lapangan Usaha	Tahun		Sumber Pertumbuhan
		2014 *)	2015**)	
<hr/>				



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,10	0,28	0,01
2	Pertambangan dan Penggalian	2,08	1,93	0,06
3	Industri Pengolahan	3,81	3,90	0,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,72	6,51	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,83	11,18	0,01
6	Konstruksi dan Sepeda Motor	11,21	8,69	1,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,42	5,59	1,57
8	Transportasi dan Pergudangan	8,22	7,57	0,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,25	3,56	0,22
10	Informasi dan Komunikasi	12,48	12,26	0,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,72	1,68	0,06
12	Real Estat	4,50	4,46	0,30
13	Jasa Perusahaan	5,04	4,67	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,00	6,04	0,40
15	Jasa Pendidikan	4,26	4,62	0,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,85	6,22	0,06
17	Jasa Lainnya	4,38	3,54	0,02
PDRB		5,83	5,40	5,40

Sumber : PDRB Kota Binjai Tahun 2015, BPS

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

B. Besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Pada tahun 2015 PDRB Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp.8.447,41 miliar, sedangkan berdasar Atas Dasar Harga Konstan 2010 tercatat sebesar Rp. 6.571,20 miliar. Atas Dasar Harga berlaku, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar pada tahun 2015 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.2481,19 miliar, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar Rp. 1.046,06 miliar.

Tabel I.19

PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
		2014 *)	2015**)	2014 *)	2015**)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	294.551,0	305.114,2	244.003,7	244.682,6
2	Pertambangan dan Penggalian	258.982,4	280.715,8	200.494,4	204.361,3
3	Industri Pengolahan	897.292,6	982.624,3	718.787,2	746.816,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.781,3	9.184,1	9.766,9	10.402,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.860,6	10.372,7	7.296,6	8.112,3



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

6	Konstruksi dan Sepeda Motor	908.441,8	1.046.060,5	742.778,7	807.325,5
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.021.514,2	2.248.186,4	1.752.758,5	850.760,9
8	Transportasi dan Pergudangan	601.036,1	676.896,5	491.298,1	528.508,8

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447.270,9	480.904,2	387.897,8	401.716,5
10	Informasi dan Komunikasi	165.743,8	187.842,7	167.190,3	187.680,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	303.990,6	323.890,1	234.390,8	238.329,9
12	Real Estat	566.062,4	622.426,4	416.478,0	435.040,4
13	Jasa Perusahaan	67.006,2	73.384,3	49.759,6	52.082,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	584.347,5	652.682,5	413.706,7	438.708,1
15	Jasa Pendidikan	388.061,7	411.231,6	301.092,5	315.017,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77.491,3	87.387,5	61.723,3	65.560,5
17	Jasa Lainnya	43.976,4	48.501,4	34.865,3	36.098,5
PDRB		7.643.410,6	8.447.405,1	6.234.288,4	6.571.204,0

Sumber : PDRB Kota Binjai Tahun 2015, BPS

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

C. Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Pada tahun 2015, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mendominasi struktur PDRB Kota Binjai sebesar 26,61 %, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 12,38 % dan Industri Pengolahan sebesar 11,63 %.

Tabel I.20

Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha (%)

No	Lapangan Usaha	Struktur	
		Tahun 2014 *)	Tahun 2015**)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,85	3,61
2	Pertambangan dan Penggalian	3,39	3,32
3	Industri Pengolahan	11,74	11,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12
6	Konstruksi dan Sepeda Motor	11,89	12,38



PEMERINTAH KOTA BINJAI
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BINJAI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,45	26,61
8	Transportasi dan Pergudangan	7,86	8,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,85	5,69
10	Informasi dan Komunikasi	2,17	2,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	3,83

12	Real Estat	7,41	7,37
13	Jasa Perusahaan	0,88	0,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,65	7,73
15	Jasa Pendidikan	5,08	4,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,03
17	Jasa Lainnya	0,58	0,57
PDRB		100,00	100,00

Sumber : PDRB Kota Binjai Tahun 2015, BPS

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

D. Pendapatan per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB (atas dasar harga berlaku) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2015 angka PDRB per kapita Kota Binjai mencapai Rp. 31,91 juta dengan indeks peningkatan sebesar 9,17 persen meningkat dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2014 sebesar Rp. 29,23 juta dan indeks peningkatan sebesar 7,34.persen.

Tabel I.21

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Binjai

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Tahun	
	2014*)	2015*)
Nilai (Juta Rupiah)	29,23	31,91
Indeks Peningkatan	7,34	9,17

Sumber : PDRB Kota Binjai Tahun 2015, BPS

Keterangan:

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara